

FENOMENA INTERNALISASI SIKAP ANTIKORUPSI DI KALANGAN MAHASISWA

PHENOMENON OF INTERNALIZATION OF ANTI-CORRUPTION ATTITUDE IN STUDENTS CIRCLES

Mubarok¹, Diah Wulandari²

^{1,2}Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Jl. Kaligawe Raya Km. 4, Terboyo Kulon, Genuk, Semarang 50112, Indonesia

¹mubarok@unissula.ac.id; ²diah@unissula.ac.id

Diterima tgl. 6 Feb 2019; Direvisi tgl. 12 Nov 2019; Disetujui tgl. 14 Nov 2019

ABSTRACT

Eradication of corruption includes aspects of repression and prevention. Continued efforts to prevent corruption are the anti-corruption attitude internalized. This study aims to explain the phenomenon of internalizing anti-corruption attitudes among students. This research strategy is phenomenological research. The study was conducted in Semarang. Primary data were obtained from in-depth interviews with respondents. In this study there were 6 respondents selected from the Student Executive Board (BEM) of Unissula Semarang, Members of the Unissula Senate Semarang, Chair of the Communication Sciences Students Association (HMJ) Unissula Semarang, Members of the Semarang Youth Public Relations, Members of the Wonosobo Student Community in Semarang, Peacock Members in Semarang. Observation was carried out by observing the process of dialogue, and following the leadership training activities to find out the anti-corruption values conveyed. Secondary data obtained from internet searches, relevant literature studies. The results of the study show the phenomenon of internalizing anti-corruption attitudes in students when it occurs through a conscious process and involves dialogue and rules in the organization. Peer groups make important contributions in the formation of anti-corruption behavior among students. In student organizations they not only talk about normative theory but also practice the use of financial budgets properly.

Key Words: *Corruption, Students, Behavior, Anti-Corruption, Communication*

ABSTRAK

Pemberantasan korupsi meliputi aspek penindakan dan pencegahan. Upaya berkelanjutan untuk mencegah korupsi adalah terinternalisasinya sikap antikorupsi dalam diri setiap elemen bangsa ini. Penelitian ini bertujuan menjelaskan fenomena internalisasi sikap antikorupsi di kalangan mahasiswa. Strategi penelitian ini adalah *fenomenological research*. Penelitian dilakukan di Semarang, Jawa Tengah. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan responden. Dalam penelitian ini terdapat enam responden yang dipilih berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unissula Semarang, Anggota Senat Unissula Semarang, Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (HMJ) Unissula Semarang, Anggota Perhumas Muda Semarang, Anggota Komunitas Mahasiswa Wonosobo di Semarang, Anggota Peacock Semarang. Observasi dilakukan dengan mengamati proses dialog dalam kelompok mahasiswa dan mengikuti kegiatan latihan kepemimpinan yang diadakan oleh BEM dan HMJ untuk mengetahui nilai-nilai antikorupsi yang disampaikan. Data sekunder diperoleh dari penelusuran internet dan kajian pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena internalisasi sikap antikorupsi di kalangan mahasiswa terjadi melalui proses sadar dan melibatkan dialog dan aturan dalam organisasi. *Peer group* memberikan kontribusi penting dalam pembentukan perilaku antikorupsi di kalangan mahasiswa. Dalam organisasi kemahasiswaan mereka tidak hanya membicarakan teori normatif, tetapi juga mempraktikkan penggunaan anggaran keuangan dengan benar. Organisasi kemahasiswaan ibarat miniatur organisasi, instansi, lembaga yang menjalankan fungsi penganggaran, penggunaan, pengawasan dan pelaporan anggaran keuangan.

Kata Kunci: Korupsi, Mahasiswa, Perilaku, Antikorupsi, Komunikasi

1. PENDAHULUAN

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia menghadapi beragam tantangan. Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi musuh nyata bagi para koruptor sehingga berbagai cara dilakukan untuk melemahkan lembaga ini. Upaya-upaya yang dilakukan secara politis menggunakan beragam jalan untuk melemahkan kinerja KPK. Selain upaya dari luar, persoalan internal KPK juga memunculkan kekhawatiran tentang optimalisasi kinerja lembaga ini. Muncul kekhawatiran persoalan-persoalan internal tersebut akan mengganggu kinerja KPK sehingga lembaga ini tidak mampu bekerja maksimal. Semenjak dibentuk pada tahun 2003 lalu, KPK selalu berhadapan dengan perlawanan-perlawanan yang dilakukan untuk melemahkan lembaga ini. Di sisi lain kasus korupsi kian hari kian marak. Setiap hari muncul berita penangkapan para pejabat korup di berbagai daerah. Pesimisme pemberantasan korupsi di Indonesia memunculkan sebuah pertanyaan, akankah korupsi di Indonesia mampu dihapus? Atau justru semakin marak dengan dilemahkannya lembaga anti korupsi.

Upaya pemberantasan korupsi meliputi dua aspek besar, yaitu penindakan dan pencegahan. Salah satu upaya berkelanjutan untuk mencegah korupsi adalah terinternalisasinya sikap antikorupsi dalam diri setiap elemen bangsa ini. Sikap itulah yang akan mampu menjadi benteng dari godaan korupsi. Salah satu elemen penting bangsa adalah generasi mudanya. Mereka kelak akan menjadi pemimpin yang meneruskan tongkat estafet bangsa. Jika sikap antikorupsi tidak tertanam kuat dalam jiwa mereka maka upaya pemberantasan korupsi akan sia-sia. Para pemimpin bangsa ini kelak akan memunculkan perilaku korup yang menggerogoti kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, internalisasi sikap antikorupsi di kalangan generasi penerus bangsa adalah persoalan penting yang harus mendapat perhatian serius. Hasil penelitian (Alfaqi, Habibi, & Rapita, 2017) menjelaskan peran pemuda dalam pencegahan korupsi dilakukan melalui tiga hal, yaitu pendidikan antikorupsi, sosialisasi antikorupsi, dan pengawasan kegiatan pemerintah. Generasi muda memiliki pengetahuan yang memadai tentang gerakan antikorupsi meskipun belum semua ingin untuk berperan serta dalam gerakan antikorupsi. Hasil penelitian (Widhiyastuti & Ariawan, 2018) menunjukkan bahwa generasi muda memiliki pengetahuan bentuk-bentuk korupsi dan perilaku antikorupsi. Meski demikian, mereka belum sepenuhnya bersedia terlibat dalam gerakan antikorupsi. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya pendidikan antikorupsi bagi generasi muda sehingga tumbuh sikap antikorupsi dalam dirinya. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memberikan muatan pendidikan antikorupsi melalui mata kuliah atau mata pelajaran di sekolah. Penelitian dari Sutrisno (2017) menjelaskan bahwa salah satu mata pelajaran yang bisa dimasukkan materi antikorupsi adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran. Selain melalui mata pelajaran dan mata kuliah, sikap antikorupsi juga bisa dibentuk melalui internalisasi di lingkungannya.

Mahasiswa adalah bagian dari generasi penerus bangsa ini yang dikemudian hari akan memegang tampuk kepemimpinan bangsa. Karena itu, sikap antikorupsi harus melekat kuat dalam jiwa mereka sehingga ketika menjadi pemimpin kelak bisa mengatakan tidak pada praktik korupsi. Upaya untuk menanamkan sikap antikorupsi dilakukan dengan berbagai cara. Pendidikan dianggap sebagai investasi yang tepat untuk membangun sikap ini. Jalan lain yang bisa ditempuh adalah dengan memanfaatkan organisasi kemahasiswaan karena mahasiswa mengasah kemampuannya di bidang organisasi dan kepemimpinan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena internalisasi sikap antikorupsi di kalangan mahasiswa dalam membentuk perilaku antikorupsi. *Peer group* adalah orang-orang sebaya atau kelompok sosialnya, seperti teman sekolah, kuliah, teman sekerja, tetangga, dan juga teman-teman sepermainan. Di dalam *peer group* terdapat jalinan ikatan perasaan yang sangat kuat, menerapkan prinsip-prinsip hidup bersama, dan bekerja sama. Di dalam jalinan yang kuat itu terbentuk norma, nilai, dan simbol-simbol tersendiri yang lain dibandingkan apa yang ada di rumah masing-masing. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan *peer group*

adalah organisasi kemahasiswaan baik yang ada di dalam kampus seperti Senat, BEM, HMJ maupun organisasi di luar kampus.

Asumsinya, jika internalisasi sikap antikorupsi melalui *peer group* berjalan dengan baik, perilaku antikorupsi akan tertanam kuat dalam diri mahasiswa. *Peer group* menjadi kelompok rujukan yang dipercaya dan mampu memberikan pengaruh kuat dalam diri mahasiswa. Karena itu, penting untuk diteliti bagaimana internalisasi sikap antikorupsi melalui *peer group* di kalangan mahasiswa. Hasil penelitian ini akan berkontribusi pada penguatan karakter antikorupsi di kalangan generasi muda melalui interaksi dalam *peer group*. Temuan penelitian akan membantu pengembangan model pendidikan antikorupsi yang relevan bagi generasi muda terutama melalui penguatan interaksi dalam *peer group*. Hasil penelitian juga bisa diaplikasikan di berbagai lingkup organisasi kepemudaan karena ikatan *peer group* demikian kuat. Model internalisasi ini bisa diadopsi dalam berbagai kelompok, baik formal maupun informal sesuai dengan karakter dari setiap kelompok.

Menurut Wijayanto (dalam Ariana Issa Sofia, 2011), salah satu pendekatan dalam gerakan antikorupsi adalah pendekatan budaya. Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah membangun dan memperkuat sikap antikorupsi individu melalui pendidikan dalam berbagai cara dan bentuk. Pendekatan ini cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk melihat keberhasilannya, biaya tidak besar (*low costly*), tetapi hasilnya akan berdampak jangka panjang (*long lasting*). Penelitian (Mapuasari & Mahmudah, 2018) menunjukkan bahwa motivasi intrinsik pelaku dan dukungan lingkungan menambah intensitas terjadinya suap dan gratifikasi. Penelitian dari Stanislaus, Damayanti, Ratna Ayu (2017) menggambarkan pemufakatan para agen dalam inefisiensi belanja daerah. Hal ini menunjukkan bagaimana korupsi terjadi karena saling mempengaruhi antarindividu. Hasil penelitian dari Putri (2017) menjelaskan bahwa orang terdekat memberi pengaruh yang kuat dalam membangun pandangan seseorang tentang korupsi. Jika orang-orang terdekat memberikan pandangan antikorupsi, cenderung diikuti orang lain. Media massa tidak cukup sebagai agen antikorupsi karena justru orang terdekatlah yang memegang peran penting. Karena itu, diskusi dengan teman sebaya, diskusi dalam kelompok kerja, dan komunikasi dengan lingkungan berperan kuat dalam gerakan antikorupsi.

Penanaman perilaku antikorupsi di kalangan mahasiswa adalah bagian dari gerakan antikorupsi melalui pendekatan budaya. Hasil penelitian Suryani (2015) menunjukkan bahwa mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan antikorupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif, mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Pendidikan antikorupsi berupaya agar mahasiswa dapat mengetahui dengan jelas permasalahan korupsi yang sedang terjadi dan usaha untuk mencegahnya. Upaya pembekalan mahasiswa dapat ditempuh dengan berbagai cara, seperti kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar, atau perkuliahan. Pendidikan antikorupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya antikorupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Penelitian tersebut memberi penekanan metode pendidikan antikorupsi melalui sosialisasi, kampanye, seminar, dan perkuliahan. Penelitian ini memberikan penekanan yang berbeda, yaitu melihat peran penting *peer group* dalam internalisasi perilaku antikorupsi di kalangan mahasiswa. Hasil penelitian Zabidin (2013) menunjukan peran penting *halaqah* (kelompok) dalam penanaman sikap antikorupsi. Materi yang berkaitan dengan pendidikan antikorupsi, seperti materi taqwa, amanah, membangun kepribadian Islam, keistiqomahan, al wafa (memenuhi janji), dan menjaga kehalalan harta menjadi bagian penting dalam interaksi dalam *halaqah*. Hal ini menunjukkan

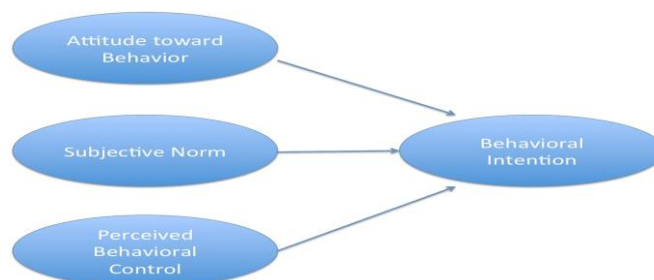
bahwa interaksi dengan *peer group* bisa menjadi sarana yang penting dalam menanamkan sikap antikorupsi. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan *peer group* adalah organisasi kemahasiswaan baik yang ada di dalam kampus, seperti Senat, BEM, HMJ maupun organisasi di luar kampus.

Keberadaan organisasi kemahasiswaan ini memegang peran penting karena di sinilah mahasiswa mengasah kemampuan berdiskusi, mengatasi masalah, dan menjawab beragam pertanyaan melalui dialog dengan teman-teman sebayanya. Interaksi yang berlangsung dengan intens dan dilakukan dalam jangka panjang akan membentuk karakter seseorang. Karakter yang tumbuh dalam interaksi dengan sebaya menjadi bagian penting dari karakter seseorang terutama di usia remaja. Karakter adalah sikap yang secara natural akan keluar dari diri seseorang ketika merespons suatu peristiwa. Karakter akan menuntun perilaku seseorang terhadap suatu peristiwa. Ketika karakter antikorupsi sudah tertanam kuat dalam diri generasi muda, ketika menjadi pemimpin kelak akan mampu menunjukkan perilaku antikorupsi.

Korupsi merupakan perilaku yang dimunculkan oleh individu secara sadar. Koruptor memahami apa yang mereka lakukan termasuk apakah tindakan mereka dibenarkan atau tidak. Tidak mengherankan jika koruptor melakukan korupsi secara bersama-sama agar bisa saling melindungi. Perilaku secara sadar ini muncul dari potensi perilaku yang ada dalam diri seseorang. Karena itu, sikap antikorupsi juga harus ditanamkan dalam diri seseorang agar muncul potensi perilaku antikorupsi yang selanjutnya menjadi perilaku nyata yang ditunjukkan dengan tidak melakukan praktik korupsi.

Teori Planned Behavior yang dikemukakan oleh Fisbhein dan Ajzen, 1975 (dalam Ramdhani, 2011) menjelaskan tiga komponen utama pembentuk potensi perilaku (intensi). Ketiga komponen tersebut adalah *attitude toward behavior*, *subjective norms*, dan *control believe*. Penjelasan ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut.

- a. *attitude toward behavior*, evaluasi positif ataupun negatif terhadap suatu perilaku tertentu yang tercermin dalam kata-kata, seperti benar-salah, setuju-tidak setuju, baik-buruk. Seorang yang memberikan evaluasi negatif terhadap perilaku korupsi dan memberikan evaluasi positif terhadap antikorupsi akan meningkatkan potensi untuk berperilaku antikorupsi dalam kehidupannya.
- b. *subjective norms*, norma subjektif yang mengelilingi seseorang akan berpengaruh terhadap tindakan yang dilakukannya. Jika seseorang dikelilingi norma, seperti norma agama, sosial, keluarga yang melarang untuk berperilaku korup maka tindakan yang dipilihnya berpotensi besar untuk tidak korup. Demikian pula sebaliknya potensi berperilaku korup semakin besar ketika norma di sekelilingnya tidak menghalangi perbuatan tersebut.
- c. *control believe*, hal ini terkait dengan kemudahan atau kesulitan untuk memunculkan suatu perilaku. Hal utama yang menjadi pertimbangan adalah sumber dan kesempatan untuk memunculkan perilaku. Seorang yang tinggal di lingkungan korup dan dia memiliki kemudahan untuk korupsi, maka dia berpotensi besar untuk melakukan korupsi, demikian pula sebaliknya.



Gambar 1. Gambaran Teori Planned Behavior (Ajzen,1991) dalam (Ramdhani, 2011)

Keterkaitan Teori *Planned Behavior* dengan penelitian ini adalah sebagai berikut. Seorang mahasiswa akan mampu memberikan evaluasi positif terhadap tindakan antikorupsi dan memberikan evaluasi negatif terhadap tindakan korupsi jika dia memiliki modal yang sudah tertanam kuat dalam dirinya. Pertanyaannya, apakah pendidikan yang diterimanya di keluarga, sekolah maupun lingkungan tempatnya bergaul sudah mampu memberikan bekal antikorupsi sehingga dia bisa memberikan penilaian positif terhadap tindakan tersebut. Meskipun tidak secara spesifik menyebut pendidikan antikorupsi, normalnya pendidikan di keluarga dan sekolah telah menanamkan sikap jujur, larangan mencuri, memanfaatkan barang orang lain, dan perilaku tercela lainnya. Jalur pendidikan formal maupun informal telah menanamkan sikap-sikap antikorupsi tersebut. Kemudian, apakah lingkungan tempatnya tinggal dan teman sebayanya juga melakukan hal yang sama atau justru sebaliknya. Jika mereka tinggal dalam lingkungan yang permisif terhadap korupsi, atau justru banyak perilaku korup yang dibenarkan, potensi mereka untuk melakukan korupsi juga tinggi. Jika mereka memiliki teman-teman sebaya yang membenarkan perilaku korup atau justru memberikan contoh cara melakukan korupsi, perilaku itulah yang akan muncul.

Peranan komunikasi dalam *peer group* merupakan bagian dari upaya membangun intensi positif terhadap sikap antikorupsi. Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan adalah mahasiswa pilihan yang di kemudian hari akan menjadi pemimpin bangsa ini. Apakah internalisasi sikap antikorupsi berjalan sebagaimana yang diinginkan atau justru organisasi kemahasiswaan mengajarkan hal-hal yang permisif korupsi. Dalam organisasi kemahasiswaan mereka belajar mengelola organisasi dan birokrasi yang memungkinkan munculnya potensi korupsi dalam lingkup organisasi sehingga organisasi kemahasiswaan bisa dijadikan sebagai sarana belajar dan internalisasi sikap antikorupsi.

2. METODE PENELITIAN

Strategi penelitian ini adalah *fenomenological research*. Pertanyaan mendasarnya menurut (Patton, 2002) adalah untuk mengetahui esensi pengalaman. Menurut (Littlejohn, 2008), fenomenologi sebagai studi tentang pengalaman yang datang dari kesadaran atau cara kita memahami sesuatu dengan secara sadar mengalami sesuatu tersebut. Hegel (dalam Moustakas, 1994) menyatakan bahwa fenomenologi mengacu pada pengalaman sebagaimana yang muncul pada kesadaran, lebih lanjut ia menjelaskan fenomenologi adalah ilmu menggambarkan apa yang seseorang terima, rasakan dan ketahui di dalam kesadaran langsungnya dan pengalamannya. Apa yang muncul dari kesadaran itulah yang disebut sebagai fenomena.

Dengan strategi ini, peneliti berusaha memperoleh refleksi fenomena realitas tentang sikap antikorupsi secara sistematis, logis, dan koheren. Moustakas (1994) menjelaskan bahwa titik utama metode ini adalah pada ide dan esensi yang tidak terbantahkan dari dunia alamiah atau realitas sehingga dibutuhkan pendekatan terhadap aktualitas dan potensialitas yang mengatur kehidupan subjek penelitian.

Penelitian dilakukan di Semarang Jawa Tengah. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan responden. Dalam penelitian ini terdapat enam responden yang dipilih berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unissula Semarang, Anggota Senat Unissula Semarang, Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (HMJ) Unissula Semarang, Anggota Perhumas Muda Semarang, Anggota Komunitas Mahasiswa Wonosobo di Semarang, Anggota Peacock Semarang. Observasi dilakukan dengan mengamati proses dialog dalam kelompok mahasiswa dan mengikuti kegiatan latihan kepemimpinan yang diadakan oleh BEM dan HMJ untuk mengetahui nilai-nilai antikorupsi yang disampaikan. Data sekunder diperoleh dari penelusuran internet, kajian pustaka yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.

Tahapan analisis data dilakukan dengan model Van Kaam (dalam Moustakas, 1994) yang meliputi: 1) Pertama, *Listing and Preliminary Grouping* di mana Peneliti mendaftarkan semua jawaban partisipan atau responden penelitian. Jawaban dari responden yang relevan yang akan didata oleh peneliti sementara jawaban yang tidak relevan tidak dianggap sebagai data penelitian. 2) *Reduction and Elimination*. Pada tahapan ini peneliti akan menguji ekspresi dari responden. Apakah ekspresi tersebut berkaitan dengan unsur pokok fenomena atau berkaitan dengan dengan pengalaman yang penting dalam proses internalisasi sikap antikorupsi. 3) *Clustering and Thematizing the Invariant Constituents (Thematic portrayal)*. Peneliti mengelompokkan dan memberi label pada inti pengalaman responden. 4) *Final Identification of the Invariant Constituents and Themes by Application: Validation*. Peneliti mengecek kembali unsur pokok yang disampaikan oleh responden dan telah dikelompokkan dalam tema dan diberi label. Konteks yang diperoleh selama observasi penelitian akan digunakan untuk mengecek kebenaran dari informasi yang diberikan oleh responden. 5) *Individual Textural Description*. Pengalaman individual dari responden yang diperoleh melalui wawancara termasuk ekspresi harfiah (per kata) dapat ditunjukkan per individu. Bentuknya harus relevan dengan tema-tema utama yang telah ditentukan. 6) *Individual Structural Description*. Hasil dari *individual textural description* akan membangun *Individual Structural Description* dari pengalaman setiap responden penelitian. 7) *Textural-Structural Description*. Setelah *Individual Textural – Structural Description* tersusun maka dibuat suatu *Composite Description* dari makna dan esensi pengalaman sehingga menampilkan gambaran pengalaman kelompok secara satu kesatuan. Hasil wawancara dan observasi diuraikan secara naratif dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ibarat penyakit menular, korupsi sudah menjalar ke berbagai sendi kehidupan bangsa ini. Kesadaran ini dimiliki oleh semua responden penelitian. Di organisasi kemahasiswaan yang mereka ikuti potensi perilaku korup juga muncul meskipun skala kesempatan dan nilainya kecil. Responden 1 menilai bahwa dalam praktek pengelolaan keuangan di organisasi kemahasiswaan rentan dengan korupsi meskipun nilainya kecil. Bentuk yang sering muncul adalah penggelembungan dana kegiatan. Responden 1 menyatakan pernah menemukan ketidaksesuaian antara harga barang yang dibeli dengan proposal yang diajukan dalam suatu kegiatan. Responden 2 dan 3 menyatakan potensi korupsi di organisasi yang dipimpinya ada meski selama ini belum pernah menemukan praktek nyata korupsi. Responden 4, 5 dan 6 menyatakan bahwa potensi korupsi keuangan di organisasinya tidak ada karena memang organisasi tersebut bersifat sukarela dan tidak didanai anggaran kampus.

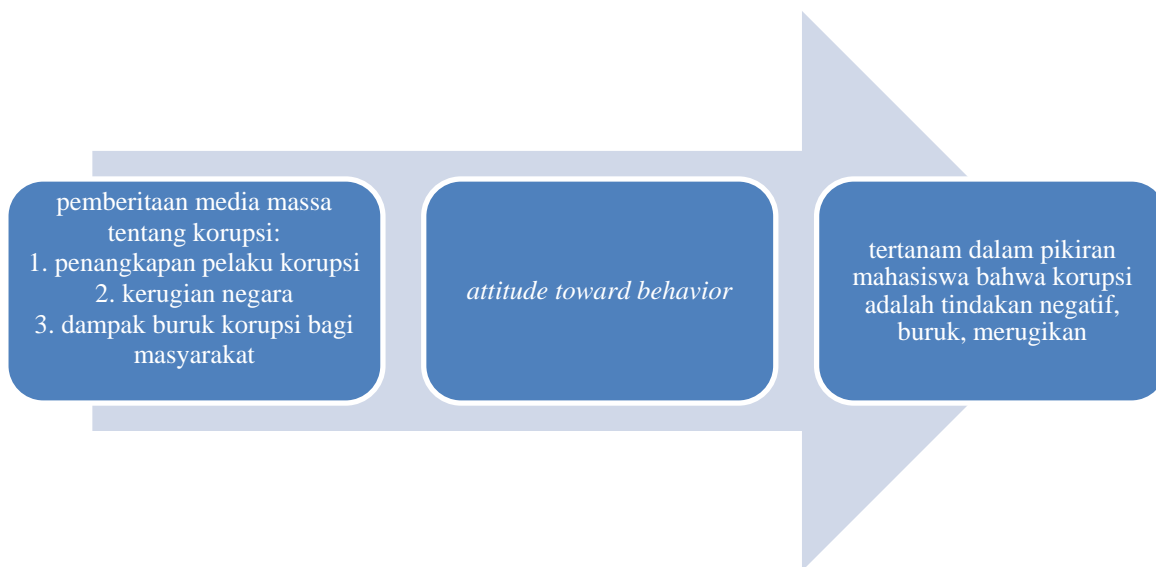
Sudah dalam kondisi yang memprihatinkan. saat ini korupsi sudah terjadi dimana-mana. bahkan bukan hanya di organisasi besar saja, tapi di organisasi kemahasiswaan juga bermunculan bibit-bibit korupsi. moral generasi penerus bangsa diajarkan tentang korupsi meskipun terkadang mereka sendiri tidak menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan korupsi (hasil wawancara dengan Responden 1, Presiden BEM FBIK Unissula, 4 Januari 2019)

Penelitian Srinita (2016) menjelaskan bahwa sektor pendidikan menjadi pelaku sekaligus korban dari tindak korupsi. Kesadaran ini juga dipahami oleh mahasiswa yang ikut dalam organisasi kemahasiswaan. Di dalam organisasi kemahasiswaan potensi korupsi terjadi dalam penyelenggaraan kegiatan seperti seminar dan pelatihan. Praktik yang sering muncul adalah

ketidaksesuaian antara pengajuan proposal penyelenggaraan kegiatan dengan realisasi. Sebagai contoh adalah penggelembungan harga barang, konsumsi kegiatan, biaya perjalanan dan memasukkan kuitansi yang tidak relevan dengan pelaksanaan kegiatan. Mereka menyadari bahwa jerat korupsi bisa menimpa siapa saja termasuk mahasiswa. Responden menyadari bahwa korupsi adalah perbuatan yang salah, buruk, dan mendukung sepenuhnya segala cara yang dilakukan untuk mencegah perilaku korup. Komponen *attitude toward behavior* dalam Teori *Planned Behavior* ditunjukkan dengan memberikan catatan negatif terhadap segala bentuk perilaku korupsi dan memberikan catatan positif terhadap perilaku antikorupsi. Catatan negatif tentang korupsi dipupuk dari beragam pemberitaan media massa yang secara jelas menggambarkan keburukan korupsi. Pernyataan senada juga disampaikan oleh responden 2 tentang fenomena korupsi yang sudah mengakar dalam kehidupan bangsa ini.

Sangat merusak, namun budaya korupsi sendiri secara tidak sadar dilakukan di dalam lingkungan pembelajaran (hasil wawancara dengan Responden 2, Anggota Senat Mahasiswa Unissula, 4 Januari 2019).

Pernyataan tersebut menunjukkan bentuk kesadaran bahwa budaya korupsi sudah merasuk di berbagai bidang bahkan di sektor pendidikan juga tidak lepas dari jerat korupsi. Tahapan pertama dalam pembentukan intensi yaitu *attitude toward behavior* sudah tertanam di kalangan mahasiswa. Korupsi selalu menjadi catatan negatif yang harus diwaspadai sehingga tidak merusak organisasi mereka. Catatan negatif tentang korupsi sebagai perilaku yang merusak tertanam dalam diri mahasiswa karena pemberitaan media massa yang mereka ikuti. Berbagai penangkapan pelaku korupsi, kerugian negara karena korupsi, akibat buruk korupsi menjadi dasar catatan negatif yang mereka berikan.



Gambar 2. Proses Pembentukan *Attitude Toward Behavior*

Untuk membentuk intensi antikorupsi, *attitude toward behavior* yang sudah terbentuk harus dibarengi dengan adanya *subjective norms* (norma subjektif) dalam organisasi kemahasiswaan. Norma subjektif yang mengelilingi seseorang akan berpengaruh terhadap tindakan yang dilakukannya. Jika seseorang dikelilingi norma seperti norma agama, sosial, keluarga dan organisasi yang melarang untuk berperilaku korup, tindakan yang dipilihnya berpotensi besar untuk

tidak korup. Demikian pula sebaliknya potensi berperilaku korup semakin besar ketika norma di sekelilingnya tidak menghalangi perbuatan tersebut.

Organisasi kemahasiswaan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang mengatur jalannya organisasi. Dalam AD ART tersebut diatur dengan jelas larangan untuk korupsi. Norma organisasi ini semestinya tidak hanya muncul dalam aturan normatif melainkan sudah terinternalisasi dalam diri setiap anggota. Karena itu, dibutuhkan beragam upaya agar norma subjektif tersebut terinternalisasi dalam diri anggota organisasi. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan dialog secara terus menerus agar norma-norma tersebut dipahami, diingat, dan melekat dalam diri setiap anggota. Kondisi ini ternyata belum bisa dilakukan secara rutin di organisasi kemahasiswaan. Dialog tentang norma subjektif antikorupsi belum mendapatkan porsi yang memadai.

Belum didiskusikan, karena masih terlalu jauh untuk mendiskusikan hal tersebut (hasil wawancara dengan Responden 3, Ketua HMJ Ilmu Komunikasi Unissula, 4 Januari 2019). Hal senada juga disampaikan responden 2, Seharusnya iya, namun untuk saat ini di Senat khususnya belum sanggup untuk masuk ke fase diskusi melanjut karena terbatasnya SDM dan kurang minatnya dengan pembahasan seperti itu.

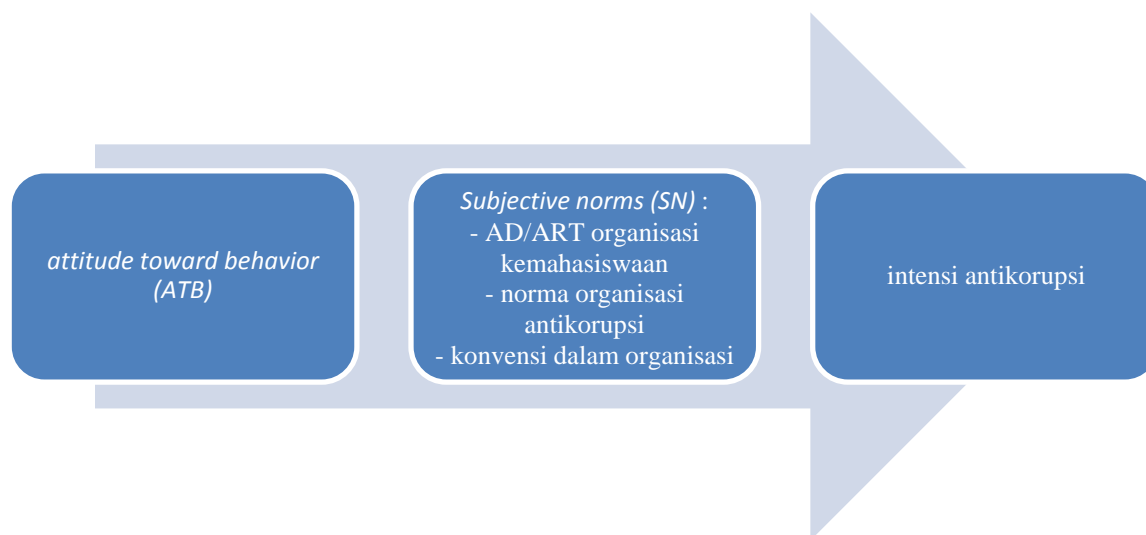
Diskusi tentang sikap antikorupsi belum menjadi topik yang diminati. Diskusi tentang korupsi lebih banyak membicarakan kasus-kasus terbaru penangkapan pelaku korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Diskusi yang dilakukan biasanya terkait dengan kasus-kasus terbaru tentang korupsi yang diberitakan oleh media massa* (hasil wawancara dengan Responden 1, Presiden BEM FBIK Unissula, 4 Januari 2019)

Selain diskusi tentang AD ART yang bermanfaat untuk membentuk norma subjektif, cara lain yang ditempuh oleh organisasi kemahasiswaan adalah dengan membuat konvensi tidak tertulis yang mencegah perilaku korup. Konvensi tersebut diinisiasi oleh Ketua BEM sekaligus sebagai bentuk keteladanan yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin. Hal ini nampak pada pernyataan Responden 1.

saya selaku ketua BEM selalu memberikan arahan kepada teman-teman bahwa BEM bukan ajang untuk hura-hura, bukan ajang untuk pamer dan meraih keuntungan, tetapi BEM adalah ajang pengabdian. langkah yang sudah saya ambil adalah dengan melakukan kegiatan sosial, kamis beramal, baksos bulan ramadhan. semua dana amal benar-benar saya alokasikan untuk kepentingan baksos. bahkan untuk makan (bukber) semua anggota BEM wajib iuran lagi. saya ingatkan terus bahwa uang amal tidak boleh digunakan untuk makan panitia. karena itu bukan uang kita. hal lain seperti pembuatan kaos panitia fakultair juga saya wajibkan memakai uang sendiri.mudah-mudahan dengan seperti itu, bisa menjadi edukasi kecil pentingnya menyadari bahaya korupsi di BEM sendiri.

Pimpinan organisasi kemahasiswaan memberikan contoh dan mengedukasi anggotanya melalui berbagai kegiatan yang dilakukan. Misalnya, dalam kegiatan sosial seperti Bakti Sosial dan Kegiatan Ramadhan dipisahkan dengan jelas dana untuk sosial tidak boleh digunakan untuk kepentingan panitia. Artinya segala operasional kegiatan sosial tidak diambil dari dana donasi yang diberikan. Secara pribadi anggota organisasi kemahasiswaan harus bersedia untuk mengeluarkan dana pribadi untuk membiayai kegiatan sosial tersebut. Norma lain yang ditanamkan adalah menjadikan organisasi kemahasiswaan sebagai tempat untuk melakukan pengabdian bukan tempat mencari keuntungan. Visi ini ditanamkan dengan jelas oleh pimpinan agar semua anggota

organisasi menyadari bahwa keberadaan mereka dalam organisasi kemahasiswaan bukan tempat untuk hura-hura dan mengambil keuntungan pribadi. Organisasi kemahasiswaan adalah wadah untuk belajar, mengembangkan potensi pribadi, dan menjalin relasi dengan orang lain.



Gambar 3. Pembentukan Intensi Melalui ATB dan SN

Kesadaran bahwa perilaku korupsi adalah negatif dan penanaman norma subjektif untuk antikorupsi perlu ditindaklanjuti dengan membuat sistem yang kuat dalam organisasi kemahasiswaan agar tidak muncul korupsi. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan membuat sistem akuntabilitas laporan keuangan sehingga menutup celah untuk terjadinya korupsi. Aspek pencegahan ini diperlukan agar anggota organisasi kemahasiswaan tidak terpengaruh untuk melakukan tindakan korupsi. Hal inilah yang menjadi aspek ketiga dalam Teori *Planned Behavior*, yaitu *Control believe* (terkait dengan kemudahan atau kesulitan untuk memunculkan suatu perilaku). Hal utama yang menjadi pertimbangan adalah sumber dan kesempatan untuk memunculkan perilaku. Seorang yang tinggal di lingkungan korup dan dia memiliki kemudahan untuk korupsi maka dia berpotensi besar untuk melakukan korupsi, demikian pula sebaliknya. Semakin kecil dan sulit kesempatan seseorang untuk melakukan tindak korupsi maka semakin kecil potensi korupsi tersebut akan terjadi. Kondisi inilah yang ingin diciptakan oleh para pengurus organisasi kemahasiswaan. Mereka menginginkan lingkungan yang antikorupsi sehingga sistem yang baik harus dibangun. Salah satu contoh sistem yang dibangun adalah pelaporan keuangan yang transparan.

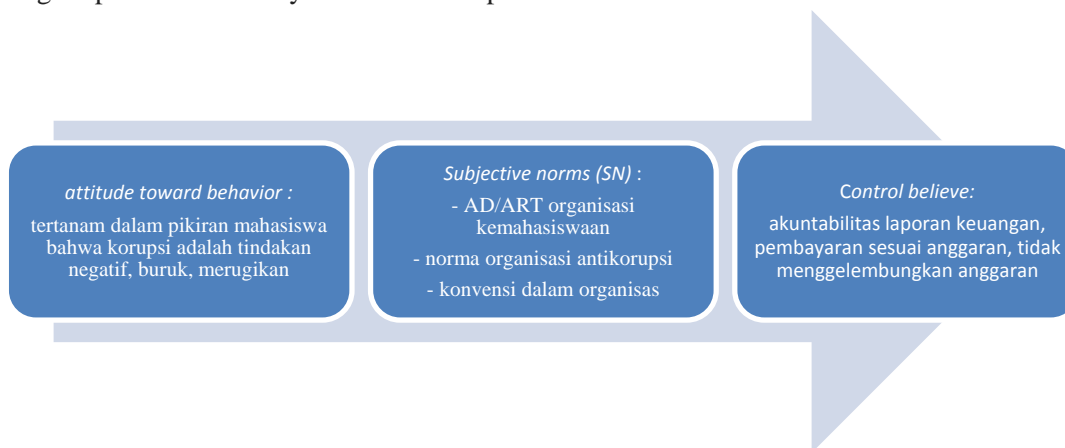
Saya menekankan kepada anggota HMJ untuk membiasakan dengan tepat membayar suatu keuangan, transparansi setiap ada kegiatan yang mengeluarkan uang banyak. Transparansi antar anggota (hasil wawancara dengan Responden 3, Ketua HMJ Ilmu Komunikasi Unissula, 4 Januari 2019).

Transparansi penggunaan keuangan, membayar sesuatu sesuai dengan tujuannya, saling mengingatkan antaranggota menjadi contoh sistem yang dibangun untuk mencegah korupsi. *Menggunakan anggaran benar-benar untuk kepentingan bersama, menetapkan komitmen*

kerja ikhlas dalam bentuk pembelajaran (hasil wawancara dengan Responden 2, Senat Mahasiswa Unissula, 4 Januari 2019).

Sistem yang kuat dan mampu menangkal potensi korupsi lebih utama daripada sekedar diskusi tentang pencegahan korupsi. Pendapat ini menguatkan bahwa upaya dari organisasi kemahasiswaan untuk menangkal perilaku korup ditekankan pada pembangunan sistem yang kuat. *Diskusi tidak perlu, hanya menekankan untuk melakukan segala sesuatu dengan ikhlas. Karena pada dasarnya semua manusia itu diciptakan tidak ada yg memiliki perilaku buruk, hanya saja sistem yg membuat perilaku buruk atau menyimpang tersebut terbentuk* (hasil wawancara dengan Responden 3, Ketua HMJ Ilmu Komunikasi Unissula, 4 Januari 2019).

Kesadaran membangun sistem yang kuat dilandasi kesadaran bahwa seorang yang baik bisa menjadi buruk ketika mereka berada di lingkungan yang buruk. Sementara sistem yang kuat dan baik akan bisa menjamin tujuan organisasi tercapai meskipun anggota berubah setiap tahunnya. Perubahan anggota dan kepemimpinan dalam organisasi tidak akan mengubah kultur dan dinamika antikorupsi selama sistem yang dijalankan dalam organisasi tersebut kuat dan mampu menjadi penangkal potensi munculnya tindakan korupsi.



Gambar 4. Rincian Elemen Planned Behavior

Intensi antikorupsi dalam diri mahasiswa bermula dari kesadaran bahaya korupsi bagi kehidupan bangsa dan masyarakat yang mereka amati sehari-hari. Gencarnya pemberitaan korupsi di berbagai media meningkatkan pengetahuan mereka tentang bahaya korupsi. Meski demikian agar intensi tersebut menjadi sebuah gerakan nyata mahasiswa membutuhkan adanya wadah untuk mengasah dan menguji intensi tersebut. Organisasi kemahasiswaan yang mengelola keuangan, menjalankan anggaran bisa menjadi wadah berlatih sekaligus menguji potensi intensi tersebut apakah mampu menjadi benteng dari godaan korupsi atau tidak. Di dalam organisasi kemahasiswaan mereka mendapat beragam kawan dengan beragam kepentingan dan latar belakang. Keberadaan teman sebaya tersebut bisa membawa pengaruh buruk sekaligus baik bagi intensi antikorupsi yang telah tertanam dalam jiwa mereka. Sikap antikorupsi termasuk dalam tindakan preventif sebagaimana disebutkan oleh Tuti (2016) memegang peran penting dibanding tindakan represif. Perbaikan sistem dan upaya terstruktur untuk mencegah korupsi menjadi bagian penting dari upaya pencegahan tersebut. Perguruan tinggi melalui sistem pendidikan yang dikembangkan bisa menjadi garda terdepan dalam menumbuhkan budaya antikorupsi. Penelitian Saifulloh (2017) menekankan pentingnya peran perguruan tinggi melalui Tridarma yang dikembangkan guna menanamkan budaya antikorupsi di kalangan mahasiswa. Benih korupsi tumbuh dalam diri mahasiswa melalui beragam jalan. Kebiasaan tidak disiplin waktu kuliah, mengakali orang tua

dalam biaya kuliah, uang jajan, dan praktik-praktik lainnya bisa menjadi faktor besar yang membentuknya menjadi koruptor di kemudian hari. Karena itu proses internalisasi sikap antikorupsi di kalangan mahasiswa harus mendapatkan perhatian serius. Melalui diskusi dengan teman sebaya di organisasi dan latihan mengelola keuangan dalam organisasi kemahasiswaan mereka bisa mengasah pribadi antikorupsi yang kuat. Penelitian (Habibi, 2018) menunjukkan pentingnya tim khusus yang dibuat oleh perguruan tinggi untuk melakukan doktrinasi antikorupsi. Proses tersebut bisa melibatkan organisasi kemahasiswaan karena lembaga ini memiliki kedekatan dengan mahasiswa sekaligus mengelola keuangan yang bisa dijadikan sarana berlatih transparansi anggaran.

4. PENUTUP

Pembentukan perilaku antikorupsi dalam organisasi kemahasiswaan menunjukkan fenomena internalisasi sikap. Fenomena tersebut menggambarkan pentingnya peran *peer group*. Organisasi kemahasiswaan terdiri dari mahasiswa dengan ragam usia yang sebaya sehingga pola komunikasi yang terbangun bersifat setara, terbuka, dan terlepas dari pola komunikasi atasan bawahan. Diskusi lebih berkembang dalam proses internalisasi dan membangun konvensi perilaku antikorupsi. Dalam kerangka Teori Planned Behavior proses pembentukan perilaku antikorupsi nampak pada gambar berikut:



Gambar 5. Proses Pembentukan Intensi Antikorupsi Berdasar Teori Planned Behavior

Attitude toward behavior sudah terbentuk karena masifnya pemberitaan korupsi di berbagai media massa. Mahasiswa memahami dengan baik bagaimana dampak korupsi bagi kehidupan bangsa dan negara. Intensi antikorupsi sudah terbentuk dalam diri mahasiswa. Untuk memelihara intensi antikorupsi tersebut dibutuhkan norma-norma positif yang mengelilingi mereka. Organisasi kemahasiswaan harus memiliki AD/ART yang jelas dan mendukung sikap antikorupsi. Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan harus terus mendiskusikan, mengingatkan dan membangun konvensi antikorupsi dalam setiap gerak langkahnya. Dalam jangka panjang proses internalisasi perilaku antikorupsi ini akan semakin kuat jika kelak mereka bekerja dan menemukan

lingkungan yang memiliki norma subjektif dan kontrol yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dengan teman sebaya memberikan kontribusi penting dalam pembentukan perilaku antikorupsi di kalangan mahasiswa. Dalam organisasi kemahasiswaan mereka tidak hanya membicarakan teori normatif tetapi juga mempraktekan penggunaan anggaran keuangan yang berpotensi korupsi. Organisasi kemahasiswaan ibarat miniatur organisasi, instansi, lembaga yang menjalankan fungsi penganggaran, penggunaan, pengawasan, dan pelaporan anggaran keuangan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada LPPM Unissula Semarang yang telah mendanai penelitian ini. Kepada pengurus organisasi kemahasiswaan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unissula Semarang, Anggota Senat Unissula Semarang, Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (HMJ) Unissula Semarang, Anggota Perhumas Muda Semarang, Anggota Komunitas Mahasiswa Wonosobo di Semarang, Anggota Peacock Semarang terima kasih atas kesediaannya menjadi responden penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaqi, M. Y., Habibi, M. M., & Rapita, D. D. (2017). Peran Pemuda Dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(3), 320–337. Retrieved from <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/viewFile/27695/18836>
- Ariana Issa Sofia. (2011). Model Pembelajaran Matakuliah Antikorupsi, Buku Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan Tinggi (p. 2011). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan Tinggi.
- Habibi, A. (2018). Doktrinasi Antikorupsi: Program Perguruan Tinggi Menanamkan Semangat Anti Korupsi Ke Alam Bawah Sadar Mahasiswa. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, 5(1), 25–36. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i1.7903>
- Littlejohn, S. W. (2008). *Theories of Human Communication 9th Edition* (9th ed.). Wadsworth: Belmont CA.
- Mapuasari, S. A., & Mahmudah, H. (2018). Korupsi Berjamaah : Konsensus Sosial atas Gratifikasi dan Suap. *Integritas*, 4(2), 159–176. Retrieved from <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/279/62>
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological Research Methods*. California: SAGE Publications.
- Patton, Q. M. (2002). *Qualitative Research Evaluation Methods, third edition* (third edit). Thousand Oak: Sage Publication, Inc.
- Putri, M. I. (2017). Hubungan Antara Pola Konsumsi dan Intensitas Diskusi Berita Korupsi Terhadap Partisipasi Politik Konstituen Pilkada DKI Jakarta 2017. *Integritas*, 3, 157–182.
- Ramdhani, N. (2011). Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research. *Buletin Psikologi*, 19(2), 55–69.
- Saifulloh, P. P. (2017). Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4), 459. <https://doi.org/10.21143/.vol47.no4.1591>
- Srinita. (2016). Strategi Menihilkan Korupsi di Sektor Pendidikan dan Kesehatan. *Jurnal Masalah Politik Dan Pembangunan*, 12(02), 1891–1902.
- Stanislaus, Damayanti, Ratna Ayu, S. (2017). Pemaknaan Efisiensi Belanja Daerah dalam Interpretative Phenomenological Analysis : Sebuah Konstruksi atas Pemufakatan Para Agen. *Integritas*, 3(2), 183–202.
- Suryani, I. (2015). Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi. *Visi Komunikasi*, 14(2), 285–301. Retrieved from <http://journal.mercubuana.ac.id/index.php/viskom/article/view/413/359>
- Sutrisno. (2017). Implementasi pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn berbasis project citizen di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 166–175.
- Tuti, R. W. (2016). Usaha mengatasi korupsi. *Swatantra*, 14(J1).
- Widhiyastuti, I. G. A. ayu D., & Ariawan, I. G. K. (2018). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi. *Acta Comitatus*, 3(1), 17–25.
- Zabidin, M. (2013). *Peran halaqah dalam menanamkan nilai dan sikap anti korupsi pada kader Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Pekalongan*. Universitas Negeri Semarang.